

BAB V

KESIMPULAN

Isu bencana alam mulai mendapatkan tempat yang cukup penting dalam hubungan internasional. Isu bencana apabila dikelola dengan tepat dapat memberikan manfaat bahkan dapat digunakan sebagai alat diplomasi yang dikenal dengan diplomasi bencana. Provinsi Bengkulu yang memiliki potensi Bencana yang tinggi dengan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami yang menjadi ancaman terbesar di Provinsi Bengkulu sejak dekade terakhir mengakibatkan Bengkulu membutuhkan kerjasama untuk mengurangi risiko bencana tersebut. Penanggulangan bencana yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana sehingga sering kali terjadi tumpang tindih dan bahkan kadang terdapat langkah upaya penting yang terlewat.

Dalam mewujudkan praktek diplomasi bencana, menurut Ilan Kelman terdapat beberapa jalur-jalur yang dapat membuat diplomasi bencana tersebut berhasil. Seperti yang telah diuraikan di bagian pembahasan, di antaranya adalah keberhasilan diplomasi bencana, sebagai berikut *Informal Networks* dan *Multiple Levels/Tracks*.

Informal networks dalam hal ini menjelaskan bahwa dengan adanya peraturan yang formal seharusnya dapat mengoptimalkan praktek diplomasi bencana dan dapat sebagai dasar negosiasi. Kesempatan tersebut sudah termasuk dalam UU. Nomor 24 Tahun 2007 terkait Penanggulangan Bencana dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari sifatnya masyarakat sipil hingga pada taraf internasional, serta banyak peraturan-peraturan yang telah dibuat seharusnya dapat mendukung Praktek Diplomasi Bencana, namun memang terkait penyelenggaraan praktek diplomasi bencana belum tertuang dengan maksimal pada UU. Nomor 24 Tahun 2007. Paradiplomasi menurut pandangan penulis merupakan suatu

bentuk keistimewaan yang diberikan kepada pemerintah-Pemda untuk bisa melakukan kerjasama dengan pihak asing. Sehingga para Pemda bisa mengenalkan dan menawarkan potensi daerah yang dimiliki sebagai langkah awal peninjauan kerjasama dengan pihak asing. Aturan mengenai pelaksanaan paradiplomasi pun sudah tertuang dengan jelas dalam UU dan peraturan menteri mengenai kerjasama internasional, sehingga bisa memudahkan untuk daerah-daerah dalam melaksanakan kerjasama. Khususnya Bengkulu, dalam hal ini pelaksanaan praktek diplomasi bencana masih bersifat *top-down*, padahal dalam *Multi Level Governance*, aktor sub-nasional juga mempunyai kewenangan tanpa harus melewati pemerintah nasional, walaupun beberapa hal harus memiliki sinergitas antara pemerintah nasional dan Pemda.

Menurut Ilan Kelman, aktivitas bencana alam belum pernah menimbulkan diplomasi yang baru akan tetapi dapat menjadi katalis dan pendukung bagi diplomasi yang telah berlangsung sebelumnya. Hal ini mungkin berjalan pada level nasional, namun belum berjalan maksimal pada level sub-nasional. Padahal telah diamanatkan dalam UU 32 Tahun 2004 tentang Pemda dalam Melakukan Hubungan Luar Negeri. Hubungan Luar Negeri Pemda ini bermanfaat untuk dapat membuka jejaring internasional guna meningkatkan daya saing dan peningkatan investasi. Setidaknya dalam praktek diplomasi bencana dapat berkontribusi positif jika dikelola dengan baik, yaitu seperti kerjasama yang telah dibangun dapat bergerak menciptakan efek-efek positif, seperti kerjasama dan peningkatan ekonomi dan sosial, yang pada tahapan ini dalam diplomasi bencana bergerak pada pasca bencana. Hal ini belum maksimal diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Problem struktural dalam UU No. 24 tahun 2007 yang belum memasukkan bencana sebagai alat diplomasi di Indonesia memunculkan

keraguan pemerintah Provinsi Bengkulu untuk melakukan inisiasi kerjasama dengan luar negeri dalam pengurangan risiko bencana di wilayah tersebut. Kerjasama Bengkulu dengan Selandia Baru pada tahapan ini beroperasi melalui rekomendasi pemerintah pusat. Kehadiran StIRRRD di Provinsi Bengkulu hanya bersifat fasilitator dan pelayanan saja. Sehingga pelaksanaan StIRRRD di Bengkulu hanya sebatas penandatanganan kesepakatan tanpa adanya tindak lanjut atas kerjasama yang telah terjalin sejak 2015 tersebut.

Jalur-jalur keberhasilan yang dikemukakan oleh Ilan Kelman dalam studi diplomasi bencana sangat serasi jika dipadukan dengan *Multi Level Governance* yang melihat sinergisitas berbagai pemangku kepentingan dalam menanggapi suatu kebijakan dan isu. Hal tersebut sangat diperlukan untuk memahami permasalahan dunia yang kompleks, karena permasalahan tidak dapat ditangani melalui *one way diplomacy* saja, diperlukan kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan (vertikal-horizontal). Dalam beberapa hal, data yang ditemukan terkait sinergisitas dan koordinasi yang dibangun antara Selandia Baru melalui StIRRRD di Provinsi Bengkulu belum berjalan maksimal karena problem struktural yang belum memberikan ruang bagi Pemda untuk melakukan diplomasi bencana. Padahal kerjasama dengan StIRRRD ini apabila dapat dikelola dengan baik oleh Pemda (sub-nasional) dalam hal ini provinsi Bengkulu seharusnya dapat berkontribusi positif dalam tahapan pencegahan bencana Gempa Bumi dan Tsunami karena setiap daerah memiliki ancaman bencana yang berbeda-beda.